

DAMPAK UNDANG – UNDANG KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN DANA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Ela Suryani⁽¹⁾, Rasji⁽²⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

e-mail: elasuryani2003@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh undang-undang ini terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kepercayaan investor, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas adanya hubungan antara tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dengan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini akan melihat upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan yang telah dilakukan di Indonesia dan sejauh mana efektivitasnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini di Indonesia.

Kata kunci : *Korupsi, Ekonomi, pajak, undang – undang.*

Abstract

This research aims to explore the impact of corruption laws and includes tax funds in Indonesia. This research will analyze the influence of this law on economic development and growth, investor confidence, community welfare, and economic equality in Indonesia. Apart from that, this research will also review the relationship between the level of corruption and misuse of tax funds and social inequality and economic inequality in Indonesia. This research will look at efforts to prevent and eradicate corruption and protect tax funds that have been carried out in Indonesia and the extent of their effectiveness. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the impact of corruption laws and understanding of tax funds as well as provide steps to improve the situation in Indonesia.

Keywords: *Corruption, Economy, taxes, laws.*

1. Pendahuluan

Pertama-tama, korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia secara ekonomi maupun sosial.

Korupsi mencuri dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan bertujuan

untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan penyalahgunaan dana. Selain itu, penyalahgunaan dana perpajakan juga memiliki dampak serius terhadap perekonomian negara. Jika dana perpajakan tidak digunakan dengan bijaksana dan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau kemasyarakatan lainnya akan terbuang percuma atau bahkan menghilang begitu saja. Ini tentu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain dampak ekonomi, penyalahgunaan dana perpajakan juga berdampak pada ketidakadilan sosial. Ketika dana yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi, kesenjangan sosial semakin memperlebar. Masyarakat yang kurang mampu akan semakin terpinggirkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, ada harapan positif di sini. Dengan keberadaan undang-undang yang kuat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melawan korupsi, kita dapat memperbaiki situasi. Pemerintah perlu memberikan contoh yang baik dan transparan dalam mengelola dana perpajakan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penyalahgunaan. Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya menggunakan dana perpajakan dengan benar dan bertanggung jawab juga harus ditingkatkan. Dampak positifnya adalah perbaikan tata kelola keuangan negara. Dengan adanya undang-undang yang mengatur korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan, pemerintah dapat mengawasi dan mengendalikan pengeluaran dana dengan lebih baik. Hal ini berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan perekonomian negara. Namun, dampak negatifnya adalah

Undang-undang terkait korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan negara ini. Dalam upaya

bahwa korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan sulit untuk diatasi sepenuhnya. Perlu adanya kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memerangi korupsi dengan lebih efektif. Selain itu, perlu diingat juga bahwa undang-undang hanya merupakan alat untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan, tetapi pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum juga perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Metode

Dalam membuat artikel diatas memakai metode kajian jenis kajian dengan yuridis normatif. Dalam melaksanakan kajian yuridis normatif yang digunakan dalam meneliti dan membahas mengenai artikel diatas yang telah dibuat dengan meneliti hubungan antara keterkaitan terhadap aspek hukum secara normatif. Dalam membuat artikel tersebut jika metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk membuat sebuah artikel diatas yakni pendekatan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap norma Hukum dan memiliki unsur yang mengandung upaya dampak undang - undang terhadap penyalahgunaan dana perpajakan terhadap korupsi. Dalam hal ini, untuk melakukan pendekatan perundang - undangan memakai UUD tentang perpajakan. jika Pendekatan perundang - undangan memakai konsep negara hukum dan demokrasi agar memiliki kesinambungan terhadap judul dengan pembahasan yang akan dikaji menjadi sebuah artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia.

untuk menangani masalah tersebut, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Masalah ini memiliki

dampak yang luas, termasuk kerugian finansial yang besar bagi negara, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta penghambatan pembangunan dan pembangunan infrastruktur. Dalam undang-undang perpajakan nomor 28 tahun 2007 bahwa seorang pegawai pajak yang menyalahgunakan dana pajak yang diatur dalam pasal 36 A yang mengatur mengenai penyalahgunaan dana pajak yang dilakukan oleh pegawai yang disebabkan karena adanya kelalaian dalam melakukan proses transaksi maka pegawai pajak dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi, cara upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Upaya-upaya tersebut melibatkan penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan terkait kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan. Namun, keberhasilan dari upaya-upaya ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti korupsi struktural, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kelemahan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dan pembenahan dalam semua aspek terkait untuk meningkatkan efektivitas dari upaya pencegahan dan penanggulangan ini. Demikian pula, hukum dan regulasi yang ada juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan. Diperlukan penegakan hukum yang kuat dan adil, serta perbaikan dalam regulasi terkait pengelolaan dana publik dan ketentuan perpajakan. Selain itu, efektivitas dari upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Faktor-faktor seperti tingkat kesadaran

masyarakat dan komitmen pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut. Terakhir, peran masyarakat juga sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan. Dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus korupsi, dampak negatif dari korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dapat diminimalisir. Kesimpulannya, pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan bagi negara ini. Upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, penting untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan dalam pengelolaan dana publik. Efektivitas Korupsi merupakan tindakan yang merupakan timbul dan termotivasi dari dalam diri. Dimana semua dimulai dan diakhiri dari dalam diri manusia itu sendiri. Jika seseorang memang tidak berniat dan memiliki kesadaran penuh untuk tidak melakukan Tindakan tersebut, maka besar kemungkinan tidak akan melakukan hal itu. Namun cara-cara diatas adalah cara-cara preventif dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya korupsi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut maka praktik korupsi dapat diminimalisir

Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dana korupsi di Indonesia, namun dalam hal ini bahwa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam hal pencegahan masih belum dapat dilakukan secara efektif dan baik untuk melakukan pencegahan maka dari itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain : upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dana perpajakan yang bisa dilakukan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Pentingnya pemerintah membuka informasi tentang pengeluaran dan penerimaan pajak secara jelas. Jadi, bukan hanya "mana uang pajakku?" tapi "Aha! buktinya ada di sini!".
2. Peningkatan Pengawasan: dalam Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi dengan cara melakukan peningkatan pengawasan.
3. Edukasi dan Kampanye: Sosialisasikan pentingnya membayar pajak dengan benar kepada masyarakat. Mungkin kita bisa melibatkan ilmuwan gila atau penari tango untuk tujuan ini.

Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia yaitu dengan meningkatkan moral perpajakan wajib pajak (Pujiati, Alam, & Amiruddin, 2021) . Moral pajak wajib pajak terdiri daritahapan preconventional dimana dalam tahap ini tahapan memberikan motivasi dalam mengambil keputusan moral yang berasal dari dalam diri akan rasa takut dengan hukuman, dengan adanya kesadaran ini akan membuat para pelaku penyalahgunaan dana perpajakan berpikir ulang untuk tidak melancarkan aksinya.

Tahapan conventional, pada tahap ini merupakan tahap pengaruh si pengambil keputusan yang berasal dari kelompok sosial

B. Hubungan antara tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan

Dengan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di Indonesia Ada hubungan antara tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Hubungannya adalah semakin tinggi tingkat korupsi terhadap dana perpajakan, maka semakin tinggi pula ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak

4. Pengadilan yang Teguh: Naikkan hukuman dan tindakan hukum yang ketat bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi dana perpajakan. Jangan lupa, kostum hakim harus tetap serius, walaupun rok hakimnya digulung tinggi.
5. Teknologi Anti-Korupsi: Gunakan teknologi modern seperti sistem elektronik untuk pengajuan dan penyelesaian perpajakan. Jadi, tak ada kesempatan bagi koruptor untuk mengubah angka-angka pajak dengan pensil grabit.

sehingga individu melakukan tindakan untuk membantu orang lain, ataudengan kata lain bahwa dana perpajakan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak jika ada salah satu pihak yang melakukan penggelapan atau kecurangan, maka potensinya akan berdampak dan menyusahkan yang lain juga. Tahanan post conventional, pada tahap ini individu membuat keputusan berdasarkan keadilan Dimana jika ditelisik ulang korupsi hanya akan memberikan manfaat pada dirinya bukan kepada orang lain yang ada disekitarnya, dengan begitu jika tetap melaksanakan korupsi maka dampak buruknya yang pertama kali merasakan adalah orang lain.

merupakan sumber pendapatan terbesar yang ada di Indonesia dengan begitu nilai dari pajak yang merupakan yang terbesar dari sumber pendapatan lainnya. Jika sampai terjadi penggelapan dana atau penyalahgunaan dana di perpajakan maka sektor ekonomi rakyat akan terganggu. Dengan terganggunya perekonomian di Indonesia maka ketimpangan dan kesenjangan sosial sudah tidak dapat terhindarkan lagi. Dimana dampak nyata dari korupsi ini adalah si kaya akan menjadi kaya

sedangkan si miskin akan tetap menjadi miskin. Jika hal itu terjadi, maka jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Dimana dalam hal ini si kaya akan memilikikesempatan yang lebih untuk dapat mengakses segala kebutuhan dan keinginan. Sedangkan bagi si miskin ia akan sangat merasa kesulitan dalam mengakses kebutuhannya serta harus bekerja sangat keras agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Jika korupsi pada sektor ini terus terjadi maka lingkaran kemiskinan semakin banyak karena anggaran pajak merupakan anggaran paling besar serta memiliki kontribusi yang besar juga terhadap pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Untuk itu korupsi di sektor ini dan segala sektor lainnya harus segera diberantas karena yang merasakan akibatnya bukanlah yang melakukan korupsi namun rakyat Indonesia. Namun , dalam hal ini bahwa penyalahgunaan perpajakan bisa terjadi tanpa keterlibatan korupsi juga. Ada orang yang secara sengaja menyembunyikan atau menghindari kewajiban pajaknya tanpa ada koneksi dengankorupsi sedikit pun. Tapi tentu saja,korupsi dapat memperburuk situasi ini dengan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi praktik penyalahgunaan perpajakan.perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untukmengatasi masalah korupsi dan. penyalahgunaan perpajakan. Dengan demikian, dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berdampak positifbagi perekonomian.

c. Simpulan dan Saran

Undang-undang terkait korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan diIndonesia memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan negara ini. Masalah ini memiliki dampak yang luas, termasuk kerugian finansial yang besar bagi negara, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta penghambatan pembangunan dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, upaya

pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Upaya-upaya tersebut melibatkan penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan terkait kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan. Namun, keberhasilan dari upaya-upaya ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti korupsi struktural, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kelemahan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dan pembenahan dalam semua aspek terkait untuk meningkatkan efektivitas dari upaya pencegahan dan penanggulangan ini. Demikian pula, hukum dan regulasi yang ada juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan. pencegahan maka dari itu adabeberapa cara yang dapat dilakukan antara lain : upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dana perpajakan yang bisa dilakukan:

1. Peningkatan Pengawasan: dalam Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi dengan cara melakukan peningkatan pengawasan Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia yaitu dengan meningkatkan moral perpajakan wajib pajak (Pujiati, Alam, & Amiruddin, 2021) . Tahapan conventional, pada tahap ini merupakana tahap pengaruh si pengambil keputusan yang berasal dari kelompoksosial sehingga individu melakukan tindakan untuk membantu orang lain, atau dengan kata lain bahwa dana perpajakan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak jika ada salah satu pihak yang melakukan penggelapan atau kecurangan, maka potensinya akan berdampak dan menyusahkan yang lain juga. Tahanapanpost conventional, pada tahap ini individu

membuat keputusan berdasarkan keadilan Dimana jika ditelisik ulang korupsi hanya akan memberikan manfaat pada dirinya bukan kepada orang lain yang ada disekitarnya, dengan begitu jika tetap melaksanakan korupsi maka dampak buruknya yang pertama kali merasakan adalah orang lain. Hubungannya adalah semakin tinggi tingkat korupsi terhadap dana perpajakan, maka semakin tinggi pula ketimpangan dan kesenjangan ekonomiyang ada di Indonesia. Dimana dalam hal ini si kaya akan memiliki kesempatan yang lebih untuk dapat mengakses segala kebutuhan dan keinginan. Jika korupsi pada sektor ini terus terjadi maka lingkaran kemiskinan semakin banyak karena anggaran pajak merupakan anggaran paling besar serta memiliki kontribusi yang besar juga terhadap pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Untuk itu korupsi di sektor ini dan segala sektor lainnya harus segera diberantas karena yang merasakan akibatnya bukanlah yang melakukan korupsi namun rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin. (2021). Penggelapan Pajak Tinjauan Moral perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 86-98.
- Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 229-242.
- SKPN, B. P. (2002). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBD/APBN. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Nabila, Mayowan, Hapsari, 2016. Analisis penerapan perencanaan pajak PPH 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016.

DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH: PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANYA DI INDONESIA Volume 7 No. 1, September 2016 hal 3.